

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pusat perdagangan, industri, serta sebagai pintu gerbang perekonomian Jawa Tengah, Semarang menjadi salah satu tujuan wilayah transit imigran. Setiap tahunnya lintas imigran semakin tinggi sehingga di Semarang terdapat Kantor Imigrasi Kelas 1 sebagai tempat untuk pelayanan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. (www.semarang.imigrasi.go.id)

Berada langsung dibawah Kementerian Hukum dan Ham, keberadaan kantor Imigrasi memiliki suatu peran yang sangat penting dalam hal pelayanan publik seperti pengurusan dokumen perjalanan, visa, ijin tinggal dan status, penyidikan dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian. Untuk mengatur hal tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Menurut Bambang Irawan, Direktur Jenderal Imigrasi, dalam talkshow keimigrasian yang berlangsung di Jakarta tahun 2013 (www.imigrasi.go.id), sebagai institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewajiban untuk meningkatkan kepuasan publik melalui pelayanan keimigrasian yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, bangunan Kantor Imigrasi di Jalan Siliwangi kurang memenuhi berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang semakin meningkat dan berkembang sesuai kebutuhan. Untuk kantor wilayah ini sendiri berada di lokasi yang cukup strategis karena berada dekat dengan pusat kota selain itu dekat dengan bandara serta jalur transportasi lainnya namun terdapat masalah kemacetan yang cukup mengganggu pihak masyarakat dan juga tampilan bangunan yang kurang representatif, sehingga Kantor Imigrasi Semarang mengusulkan pembangunan gedung baru kepada pusat, dengan tujuan meningkatkan kepuasan publik. (*Wawancara dengan Kepala Urusan Umum Kanim Semarang*).

Pada kenyataan lapangan yang ada, kondisi bangunan gedung kantor Imigrasi Klas 1 di Semarang saat ini memang masih belum memenuhi kebutuhan yang ada, baik kondisi fisik setiap ruang maupun kebutuhan ruang yang ada, serta sirkulasi. Selain itu kondisi lahan parkir yang kurang juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar karena kendaraan yang tidak dapat parkir didalam area kantor terpaksa harus parkir disepanjang tepi jalan sehingga mengurangi nilai estetika tampilan bangunan serta membuat pengunjung yang tidak dapat memarkirkan kendaraan didalam area parkir merasa kurang aman.

Upaya pembangunan sebuah wilayah untuk memperoleh kualitas yang lebih baik terus dilakukan oleh pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Denny Indrayana menuturkan perbaikan telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui pengembangan kesisteman dan infrastruktur guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik serta mengurangi peluang penyalahgunaan oleh petugas pemberi pelayanan. Salah satu upaya

yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang nyaman, termasuk fisik bangunan yang mewadahnya untuk mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Melihat potensi dan permasalahan yang telah diuraikan maka perlu perencanaan sebuah redesain Kantor Imigrasi Klas 1 di Semarang yang dapat memberikan kenyamanan bagi para penggunanya serta dapat menampung seluruh aktivitas di dalam kantor tersebut baik untuk saat ini maupun masa mendatang dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan serta memiliki tampilan bangunan yang lebih baik dan representatif sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penggunanya serta suasana kerja yang lebih efisien.

1.2 Tujuan

Mendesain kantor imigrasi yang sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan penggunakantor imigrasi itu sendiri sehingga dapat memberikan rasa nyaman serta aman bagi penggunannya.

1.3 Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam penulisan landasan program perencanaan dan perancangan redesain Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang menitik beratkan pada hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur seperti aspek fungsional, aspek teknis, aspek kinerja, aspek kontekstual dan aspek arsitektural. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

1.4 Metodologi

Metoda penyusunan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Redesain Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dilakukan dengan cara memahami segala aktifitas dan kegiatan keimigrasian yang terjadi dilapangan yaitu di Kantor Imigrasi Semarang. Dengan pemahaman ini akan diketahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan dari sebuah kantor imigrasi, langkah yang digunakan yaitu:

1. Observasi atau mengamati secara langsung kondisi eksisting Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang, aspek yang dilihat yaitu penataan ruang, alur sirkulasi, utilitas bangunan, dll.
2. Melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Semarang, serta beberapa staff Kantor Imigrasi Semarang.
3. Studi Banding
Studi preseden dilakukan untuk melihat kondisi kantor imigrasi yang ada di daerah lain yang juga dikasifikasikan dalam kantor imigrasi klas 1 sehingga dapat dilakukan perbandingan antara kantor imigrasi yang satu dengan lainnya. Perbandingan ini dilakukan untuk mencari acuan dalam mendesain kantor imigrasi nantinya. Aspek-aspek yang diamati dalam studi banding yang dilakukan yaitu :
 - a. Layout Bangunan kantor imigrasi
 - b. Alur sirkulasi
 - c. Zonasi kantor imigrasi
 - d. Struktur Organisasi

e. Utilitas kantor imigrasi

Kantor imigrasi yang menjadi studi banding antara lain :

- Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
- Kantor Imigrasi Surakarta

4. Studi Literatur

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan dan perancangan kantor. Literatur yang digunakan antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR07.04 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja kantor imigrasi.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
- c. *Planning Office Space*, Francis Duffy, 1976.
Digunakan untuk mengetahui perencanaan ruang kantor secara umum.
- d. *Data Arsitek*, *Ernst Neufert*, 1999.
Data arsitek digunakan untuk memperoleh standar normal besaran ruang dalam mendesain gedung perkantoran.
- e. *Time Saver Standards for Building Types 2nd Edition*, Joseph De Chiara, 1983.
Digunakan untuk memperoleh besaran ruang umum yang tidak terdapat pada data arsitek.
- f. *Human Dimension and Interior Space*, Julius Panero, 1979
Digunakan untuk memperoleh besaran ruang.